

**PERILAKU ANGGOTA DEWAN DALAM MENJALANKAN
FUNGSI SEBAGAI KADER PARPOL DAN WAKIL
MASYARAKAT**
Skripsi

ABDUL ROHIM
1631040100



Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. H. M Aqil Irham, M,Si
Pembimbing II :Dr.Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M

**PERILAKU ANGGOTA DEWAN DALAM MENJALANKAN
FUNGSI SEBAGAI KADER PARPOL DAN WAKIL
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

Abdul Rohim

1631040100



Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. H. M Aqil Irham, M,Si

Pembimbing II :Dr.Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

ABSTRAK

PERILAKU ANGGOTA DEWAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI KADER PARPOL DAN WAKIL MASYARAKAT

**Oleh
ABDUL ROHIM**

Salah satu ekspektasi wakil masyarakat adalah tersalurkannya aspirasi mereka melalui anggota dewan yang mereka pilih, dengan mekanisme penjangkaran dan penyaluran aspirasi. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kepada anggota dewan terpilih harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan reses dan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Anggota DPRD telah melakukan perilaku politik dengan masyarakat meskipun perilaku yang dilakukan tidaklah seperti yang diinginkan, dalam pelaksanaan reses dengan wakil masyarakat, banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan tepat guna. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melakukan perilaku anggota dewan ini diantaranya berkenaan dengan masalah disiplin manajemen waktu kerja, kurang pahamiannya tupoksi kerja, kurangnya penguasaan media informasi dan teknologi. sehingga berdampak bagi anggota dewan dalam perilaku politik yang dianggap tidak aspiratif. Anggota DPRD harus berperilaku dengan baik kepada wakil masyarakatnya karna dengan sistem politik lokal yang mengakibatkan anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak terwujud. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara mendalam mengenai keadaan latar belakang dan interaksi lingkungan satu unit sosial baik individu kelompok, lembaga atau masyarakat. Menurut sifat penelitiannya ini bersifat deskriptif, dan menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini ialah yang terdiri dari dapil 2 anggota DPRD Lampung Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku anggota DPRD Lampung Selatan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil masyarakat, telah dijalankan dengan baik telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku, dan fungsi anggota DPRD

tersebut dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sebagai berikut: Anggota DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil masyarakat adalah faktor Pendidikan, Pengalaman berorganisasi, dan kedisiplinan terkategori sebagai faktor pendukung, diharapkan dapat dioptimalkan anggota DPRD dalam menunjang kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai hak yang dimiliki demi kemajuan bersama. Upaya memperbaiki kualitas dan fungsi DPRD dibentuklah suatu kode etik yang bertujuan sebagai patokan atau pedoman tentang sikap dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya selama menjabat sebagai anggota DPRD.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'aiakum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL ROHIM
NPM : 1631040100
Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul PERILAKU ANGGOTA DEWAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI KADER PARPOL DAN WAKIL MASYARAKAT. Adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti. Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 27 Juni 2021

Penulis,



ABDUL ROHIM
NPM. 1631040100

MOTTO

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Katakanlah (Muhammad) “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kepada siapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa pun yang engkau kehendaki. Ditangan engkaulah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. (Qs al-Imran :26)





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Letkol H. Indro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perilaku Anggota Dewan Dalam
Menjalankan Fungsi Sebagai Kader
Parpol dan Wakil Masyarakat**
Nama : Abdul Rohim
NPM : 1631040100
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si
NIP. 196912111994031005

Pembimbing II

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004

**Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

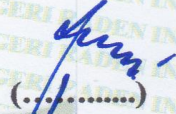
Alamat: Letkol H. Indro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN


**Skripsi dengan judul: Perilaku Anggota Dewan Dalam
Menjalankan Fungsi Sebagai Kader Parpol dan Wakil
Masyarakat . Disusun oleh: Abdul Rohim ,NPM: 1631040100,
Program Studi: Pemikiran Politik Islam. Telah Diujikan Dalam
Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi UIN Raden
Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021**

TIM PENGUJI

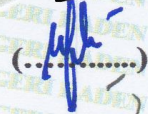
Ketua : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag


(.....)

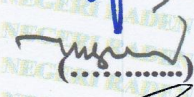
Sekretaris : Eska Prawisudawati Ulpa, S.Psi, M.Si


(.....)

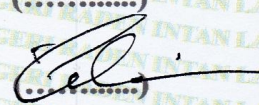
Penguji Utama : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si


(.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si


(.....)

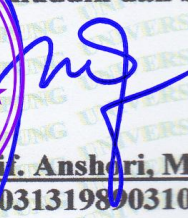
Penguji Pendamping II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si


(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

Dr. M. Anshori, MA
NPM. 196003131980031004



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga penelitian ini dapat selesai, dan penelitian ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Ismail (Alm) Meskipun engkau telah bersama Allah SWT di surga sana, engkau tetap menjadi pahlawan penyemangat dalam hidupku. dan Ibu Hasiah yang telah membesarkan aku dalam hangatmu, kau kirimkan aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do'a. Tak ada keluh kesah diwajahmu dalam mengantar anakmu kegerbang masa depan yang cerah tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan. Cintamu hiasi jiwaku dan restumu temani kehidupanku, tiada lagi yang kuinginkan didunia ini selain terus berdo'a dan berusaha tuk selalu membahagiakan mu.
2. Untuk kakak-kakak ku tersayang, Elpian, Elwan Dani, Antoni, Abdul Rohman, dan adikku tersayang Isro Abidin. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat, serta doa-doa yang telah kalian berikan.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

ABDUL ROHIM, lahir di Siring Jaha pada tanggal 12 Maret 1997. Peneliti merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Ismail dan Ibu Hasiah.

Pendidikan yang peneliti tempuh mulai dari selesainya di MI Mathla'ul Anwar pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Sidomulyo yang diselesaikan pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Budidaya yang diselesaikan pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Peneliti melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program Studi Pemikiran Politik Islam di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif menjadi anggota di uniT kegiatan mahasiswa yaitu UKM ORI (Olahraga Raden Intan).

Bandar Lampung, 27 Juni 2021

Peneliti,



ABDUL ROHIM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Kader Parpol Dan Wakil Masyarakat”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW yang kitanantikan syafaatnya diakhirat nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar (S1) Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, petunjuk, saran, informasi dan pengarahan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan berterimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampustercinta ini.
2. Bapak Dr. M. Afif Anshori selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. M Aqil Irham, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
5. Bapak DR. H. Abdul Malik Ghozali, M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan Saran dan Motivasi.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama prodi Pemikiran Politik Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan

studi.

7. Seluruh Staff dan Kepegawaian Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf yang turut memberikan literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
9. Ketua DPRD Lampung Selatan yaitu H. Hendry Rosyadi, serta keanggotaan badan-badan di DPRD Lampung Selatan
10. Terima kasih untuk Ayah, Ibu, Keempat kakakku dan Adikku tercinta, serta keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan semangat, dorongan serta motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
11. Terima kasih untuk Teman dan Sahabat terbaik M. Reza Darmawan, Gilang Rahman Adri Yunus, Nabil Abdurrahman, Rizky Ilmawann yang telah saling support dan yang telah memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain. Semangat untuk meraih gelar S. Sos.
12. Teman-teman KKN kelompok 88 Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang telah banyak memberikan pengalaman berharga dan terkhusus terimakasih untuk 40 hari kebersamaan yang bermakna yang selalu memberikan canda, tawa dan kesan selama ini.
13. Keluarga Besar Gojek Basecamp Depot Jamu Sultan Agung yang telah mendoakan dan memberikan semangat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Signifikansi Penelitian	9
G. Penelitian Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Perilaku Politik	15
B. Konsep Anggota Dewan	17
C. Perilaku Anggota Dewan	18
D. Kedudukan dan Fungsi DPRD.....	21
E. Indikator-Indikator Perilaku Anggota Dewan.....	23
1. Kaderisasi	23
2. Partai Politik	35
3. Wakil Masyarakat	40

F. Definisi Operasional	42
BAB III.DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	45
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	53
BAB IV. ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Penelitian	77
B. Temuan Penelitian	92
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan..... 45

Tabel 1.2 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan 46

Tabel 1.2Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan 47

Tabel 1.3Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Selatan 47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Gambar 1.2 Wawancara dengan Sekretaris DPRD Lampung Selatan

Gambar 1.3 Wawancara Dengan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Gambar 1.4 Kunjungan Kerja Reses Dalam rangka sosialisasi peraturan daerah didesa siring jaha kecamatan sidomulyo

Gambar 1.5 Kunjungan Kerja Reses Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Desa Sukamarga Kecamatan Waypanji

Gambar 2.1 Kunjungan Kerja Perorangan Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat Dan Pemberian Alat Pertanian Di Desa Palas Belanga Kecamatan Palas



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
2. Surat Izin Penelitian Sekretariat DPRD kabupaten Lampung Selatan
3. Surat Konsultasi Pembimbing
4. Surat Persetujuan Pembimbing
5. Hasil Turnitine
6. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terhadap judul seperlunya. Judul skripsi ini adalah **“Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Kader Parpol dan Wakil Masyarakat”**. Judul tersebut terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.¹ Definisi ini juga dapat menunjukkan adanya nilai bahwa perilaku adalah reaksi terhadap stimulus yang diberikan secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis). Kemudian perilaku politik menurut David.E Apter dalam buku pengantar analisa politik menjelaskan bahwa perubahan perspektif penting untuk mengamati tindakan individual. Artinya dapat dikatakan bahwa definisi perilaku dalam konteks ini adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap aktivitas politik dalam suatu negara.

Anggota dewan adalah bagian tubuh majelis atau badan yang terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). h. 859.

daerah.² Dalam hal ini anggota dewan juga mempunyai fungsi yaitu legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Anggaran yang memiliki kewenangan dalam hal anggaran daerah, serta pengawasan yang didalamnya memiliki kewenangan dalam hal mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah.

Masyarakat menurut Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan Wakil masyarakat adalah sekelompok orang yang dibentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya melalui pemilih di daerah pilihannya, yang kemudian dijadikan pendukung partai politik ataupun calon anggota dewan yang dicalonkan dari awal sampai berikutnya dia tetap menjadi pendukung pemilih setia dalam pemilihan.

Berdasarkan uraian diatas maksud dari judul ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang segala bentuk perilaku anggota dewan yang dilihat dari aspek dalam menjalankan fungsi, baik sebagai kader parpol maupun dengan wakil masyarakat dari sini penulis ingin mengetahui keterkaitan anggota dewan dengan partai yang telah menjadikannya sebagai anggota dewan, kemudian apakah sebagai kader ia sudah menjalankan apa yang diinginkan partai dan melihat hubungan antara masyarakat yang ada di daerah pilihan, karena secara tidak langsung anggota dewan adalah sebagai wakil rakyat yang semestinya menjalankan fungsinya dengan baik.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, baik itu tersurat maupun tersirat dan hal diatas jugalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat suatu karya ilmiah yang berupa

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah* Pasal 29 ayat (1).

sebuah skripsi yang berjudul **“Prilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan fungsi Kader Parpol dan Wakil Masyarakat”**

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang berada di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga negara dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3: “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah, pada pasal 149 ayat 1 dipaparkan bahwa terdapat tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah;
- b. fungsi *budgeting*, yaitu fungsi penetapan anggaran;
- c. fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan perundang-undangan.³

Guna memaksimalkan kinerja para anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan

³*Ibid*, Pasal 149 (ayat 1).

fungsinya dan demi mencapai keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan tiap anggota-anggota DPRD dalam menjalankan tugas, maka dibentuklah suatu kode etik yang bertujuan sebagai patokan atau pedoman tentang sikap dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya selama menjabat sebagai anggota DPRD. Kode etik profesi tentunya hanya berlaku efektif apabila dijiwai dan dihayati oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi tersebut.

Lonto dan Pangalila, menjelaskan “masalah etika dan moral juga mulai harus dipertimbangkan sejak penyusunan Perda sampai kepada implementasi perda dan pemberlakuannya di tengah-tengah masyarakat”.⁴ faktor etika dan moral yang melandasi tahap tersebut sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara ini dan sangat menentukan bentuk dan wujud serta karakter peraturan yang dihasilkan dan kondisi masyarakat yang akan diciptakan dengan peraturan tersebut. Kajian Zulkarnain, pasca reformasi hingga tahun 2010 dengan konfigurasi politik yang lebih demokratis, fungsi pengawasan DPRD telah mendapatkan ruang yang lebih luas untuk dipraktekkan. Namun perkembangan positif tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya atas pemerintah. Bahkan cenderung mempermainkan fungsi tersebut untuk menjadi alat tawar-menawar antara DPRD-Pemerintah. Maka tidakkah rumusan fungsi pengawasan DPRD di dalam undang-undang lembaga perwakilan telah memberikan kesempatan bagi DPRD untuk benar-benar menjalankan fungsi tersebut sebagaimana mestinya.⁵

Berbicara tentang politik tidak terlepas dari partai-partai politik yang bermunculan baik itu berbasis Islam maupun

⁴Lonto dan Pangalila, *Etika Kewarganegaraan*. (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), h.137.

⁵Zulkarnain Ridlwan, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, pengembangan dari Tesis pada Magister Hukum UGM a.n. Zulkarnain Ridlwan, *Perkembangan Pengaturan Atas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2010.

Nasionalis, di sini kita bisa melihat betapa banyaknya partai yang bermunculan di Indonesia kemudian partai-partai yang ada hanya mengejar tujuan-tujuan tertentu baik itu kelompok maupun golongan tidak memikirkan definisi politik itu sendiri.

Akan tetapi, kegiatan politik ini banyak menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik yang materil maupun mental) yang dikejar biasanya langka sifatnya. Di pihak lain di negara demokrasi, kegiatan politik ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflik resolution*) atau konsensus (*consensus*).

Hal ini tidak dapat di sangkal bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi yang buruk atau negatif. Hal ini disebabkan karena mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga, malu, dan marah. Tidak heran jika dalam kehidupan sehari-hari kerap kali kita berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji seperti yang dirumuskan oleh Peter Melk politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*) yaitu perbuatan kuasa, tahta, dan harta.⁶

Hakekatnya partai politik adalah alat perjuangan politik bagi masyarakat, tetapi tidak sedikit justru juga sering mengundang konflik (pemicu konflik) yang terjadi di masyarakat. lebih parah lagi dan ironis pula, konflik justru berawal dari dalam tubuh partai (internal partai) atau antar partai kemudian menjalar ke masyarakat luas. partai bukanlah agama yang harus bersikap fanatik. Partai adalah sarana, kendaraan politik juga alat untuk memperjuangkan kepentingan politik. Jadi tidak perlu mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan kita demi mempertentangkan suatu kepentingan

⁶ Gatara, Sahid, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Kajian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007), h.228-229

tertentu dalam partai. Dalam hal perbedaan pendapat adalah wajar dalam kehidupan politik. Malah seharusnya dalam kehidupan berpartai itu selalu terjadi perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan kritis dan dinamis, akan tetapi tidak harus berkembang menjadi konflik atau melahirkan dendam politik.

Dalam kehidupan masyarakat luas, dimana berbagai kepentingan bercampur baur, tidak sedikit melahirkan konflik dan semua beradu untuk mendapatkan kemenangan. Di samping mudah terpicu konflik horizontal di antara warga masyarakat sendiri, juga tidak sedikit melahirkan konflik vertikal, yaitu pertentangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian ini, partai politik harus tampil sebagai penengah dan menjadi peredam konflik.

Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa dan menginformasikan kehendak politik penguasa kepada masyarakat. dalam hal konflik terjadi di tengah masyarakat, partai politik hendaknya mampu menyelesaikan konflik melalui penyelesaian politis, antara partai politik yang mewakili suara komunitas masing-masing di DPRD.

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa indikator yang menyebabkan keberadaan anggota lembaga legislatif dewasa ini kurang memenuhi persyaratan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Indikator tersebut terlihat dari beberapa fakta yang dimuat pada beberapa media masa dan media internet. Dari fakta-fakta yang diungkapkan dalam media masa atau internet tersebut, menunjukan rendahnya kredibilitas dan integritas anggota lembaga legislatif yang memprihatinkan di berbagai tempat. Kondisi demikian memperlihatkan adanya pelanggaran norma dan etika yang terjadi di berbagai tatanan lembaga legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Beberapa indikator rendahnya kredibilitas dan integritas perilaku anggota dewan sebagai kader parpol dan wakil rakyat sebagai berikut.

- a. Sistem pendidikan dan rekrutmen politik ormas dan partai politik;

- b. Sumber daya manusia partai politik dari pendidikan sangat beragam, namun mayoritas berpendidikan rendah;
- c. Sistem legislasi pemerintahan daerah;
- d. Sentralisme partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah”⁷

Berdasarkan uraian diatas, untuk menjalankan fungsinya dengan baik ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan adalah kinerja anggota dewan sebagai ujung negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selain itu kinerja anggota dewan merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Akan tetapi, adanya fakta dan keluhan masyarakat yang menunjukkan bahwa 3 anggota dewan maksimal kinerjanya diantaranya Malik Ibrahim dari fraksi Gerindra, Suhar pujiyanto dari Fraksi PDIP dan Abu Bakrie dari Fraksi Demokrat. apalagi kinerja yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena ini nampak pada kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan misalnya, anggota dewan pada Dapil 2 yang tidak tahu akan tupoksi kerja, kurang nya penguasaan media informasidan teknologi. Dan kurang disiplin dalam manajemen waktu kerja. Rendahnya perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsinya yang diperlihatkan anggota dewan juga dapat dilihat daftar hadir yang terlihat masih kurang disiplin dalam kehadiran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis paparkan di atas, baik itu tersurat maupun tersirat dan dari hal diatas jugalah yang melatar belakanginya Penulis untuk membuat suatu karya ilmiah yang berupa sebuah Skripsi yang berjudul **“Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Kader Papol dan Wakil Masyarakat”**.

⁷ Muhammad Aqil Irham, Demokrasi Muka Dua Membaca Ulang Pilkada di Indonesia, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2016), h.154.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengkaji atau membahas tentang Perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil 2 Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi, Anggaran dan pengawasan yang mewakili kepentingan parpol dan aspirasi masyarakat . Secara spesifik penelitian ini akan melihat bagaimana kinerja anggota DPRD menjalankan fungsinya sebagai legislatif . Sedangkan subjek yang di teliti ialah seluruh anggota legislatif Dapil 2 yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut.

1. Bagaimana perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil masyarakat?
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil masyarakat.

F. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu bagi pembaca dalam bidang politik sejauh mana perilaku anggota dewan menjalankan fungsinya kepada wakil masyarakat serta mengerti bagaimana keduanya melaksanakan program dengan berjalan baik sesuai dengan keinginan keduanya.
2. Secara praktis, sebagai pembelajaran bagi penulis dan kedepannya dapat menjadi contoh menjadikan anggota dewan dapat menjalankan fungsinya sebagai kader dan wakil masyarakat dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku di DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

G. Penelitian Yang Relevan

Kajian atau tinjauan pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Dalam penelitian skripsi ini peneliti dapat mengemukakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah terkait dengan judul tersebut, antara lain:

1. Hendrarto dalam Jurnalnya berjudul “*Peran dan fungsi partai politik dalam mencetak kader pemimpin (Mekanisme dan Tanggung Jawab Pemimpin)*” Tahun 2006. Permasalahannya, bagaimana peran dan fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana mekanisme rekrutmen kader-kader partai calon pemimpin yang kita harapkan bersama itu, serta bagaimana tanggung jawab pemimpin. Kesimpulannya, partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi, dengan demikian diharapkan partai menjadi salah satu tumpuan guna menjelmakan dan

mengimplementasikan kepentingan rakyat terutama dalam mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang kita harapkan bersama. Penelitian ini berfokus pada peran partai dalam menciptakan kade-kader pemimpin. Penelitian penulis berfokus pada perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi parpol dan wakil rakyat.⁸

2. Slaudia Asfica, JOM” *Peran dan Perilaku Anggota Dewan Kota Pekanbaru Fungsi Legislasi Tahun 2015*”. Rumusan masalah, “Bagaimana sikap dan perilaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru Pewriode 2014 – 2019 Dalam Pembahasan Ranperda PMB-RW?”. Kesimpulannya, secara keseluruhan sikap dan perilaku Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi khususnya ketika dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sudah dijalankan dengan baik. Akan tetapi terdapat sikap kurang terbuka antar sesama anggota dewan yaitu ketika sidang paripurna dengan agenda pengesahan Ranperda PMB-RW adanya anggota dewan yang mengaku belum mendapat draft Ranperda terkait.⁹
3. Mohammad Hidayatturrahman, Jurnal “*Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili berbasis pada daerah pemilihan (Dapil) dalam pembangunan. Kesimpulannya, Anggota dewan dari wilayah kepulauan perlu menfokuskan perannya pada fungsi penganggaran dan legislasi yang diarahkan pada program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang terkait dengan hajat hidup dan kebutuhan mendasar warga kepulauan, terutama pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasana angkutan transasportasi, gedung kesehatan dan

⁸ Hendrarto. Jurnal” *Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mencetak Kader Pemimpin (Mekanisme dan Tanggung Jawab Pemimpin)*. Vol. 26 No. 2, 15 September 2006 (Tahun ke-13): 310-318.

⁹ Claudia Asfica, JOM. “*Peran dan Perilaku Anggota Dewan Kota Pekanbaru Fungsi Legislasi Tahun 2015*. FISIP. Vol.4 No. 2, Oktober 2017.

pendidikan, termasuk listrik yang sangat dibutuhkan oleh warga kepulauan. Jika itu dilakukan, maka peran anggota dewan akan lebih maksimal dirasakan warga kepulauan.¹⁰

Dari tinjauan beberapa penelitian relevan diatas dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa penelitian tentang judul yang penyusun buat belum pernah ada yang membahas sebelumnya, terutama pada aspek fungsi anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid.¹¹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana kinerja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan dengan melihat dari aspek pelaksanaan legislasinya. Di mana data dikumpulkan serta diolah dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan skripsi ini. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang komprehensif dan valid secara ilmiah dalam sebuah penulisan karya ilmiah, tentu saja diperlukan metode sebagai sarana untuk memperoleh akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan menelaah data yang relevan dengan topik kajian kemudian dianalisis.

¹⁰ Mohammad Hidayatullahman, Jurnal “Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep. Jurnal Sosial Politik, Vol 6 No 1 (2020), Hlm 128-141

¹¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.(Jakarta: Alfabeta,2011.),h..2

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dataprimer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan seluruh anggota legislatif yang di DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada lokasi penelitian yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Serta rujukan buku, koran, dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan

Data Suatu penelitian tentunya membutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan¹². Untuk memperoleh data penelitian yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengambil beberapa data guna mendapatkan informasi ialah sebagai berikut:

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Jakarta: Alfabeta, 2011.) h.224

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai secara langsung. Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data-data secara maksimal. Dan penulis terlebih dahulu menentukan beberapa informan kunci sebagai data. Informan kunci yaitu orang yang di angap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan di gali, dan informan kunci yaitu anggota dewan di DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat .

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Dalam Sugiyono, observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi dilakukan untuk pembuktian terhadap informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan¹³ . Penulis dalam penelitian ini mengamati secara langsung bagaimana kinerja anggota dewan dalam menjalankan fungsinya di DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman)

¹³ Ibid.h166

dilakukan peneliti di DPRD Kabupaten Lampung Selatan . Menurut Guba dan Lincoln dalam Moloeng dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan¹⁴.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan dimuat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB IILANDASAN TEORI

Bab ini meliputi kajian teori tentang perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi sebagai kader parpol dan wakil masyarakat serta definisi operasional.

BAB IIIDESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini Menguraikan tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IVANALISIS PENELITIAN

Bab ini meliputi analisis penelitian dan temuan penelitian.

BAB VPENUTUP

Dalam bab ini, penulis menguraikan konklusi-konklusi hasil penelitian disertai rekomendasi sebagai implikasi dari penelitian.

¹⁴ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h.206

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perilaku Politik

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun

berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.¹⁵

Perilaku politik menurut David E. Easton adalah perubahan perspektif penting untuk mengamati tindakan politik individual atau kelompok. Perhatian utama paham tingkah laku terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana menyadari peristiwa-peristiwa politik. Kategori pemikiran seperti ini biasanya dianggap sebagai ideologi yaitu sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkah laku yang penuh makna.¹⁶ Ideologi politik menurut Miriam Budiardjo merupakan himpunan nilai, ide-ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok orang atas dasar ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya.¹⁷

Dalam teori sistem umum dikatakan politik terdiri dari suatu hubungan antara *input*, tuntutan, dan *output* sebagai kebijaksanaan pemerintah. Dorongan awal terdapat tindakan politik adalah hasrat untuk memperbesar manfaat. Teori-teori kegunaan mewakili

¹⁵RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999 Hal 130

¹⁶ David E Easton, *pengantar analisa politik*, (Jakarta : LP3ES 1985), h. 209-210

¹⁷ Riaty Raffiudin, *Modul 1 Ruang Lingkup Teori politik*. Tersedia (online) di <https://repository.ut.ac.id/4210/1/IPEM4215-M1.pdf>. Diakses pada minggu 21 maret 2020 pukul 03.44 WIB

tingkahlaku politik seperti ekonomi politik dari pilihan-pilihan dan kesempatan-kesempatan.

Keseimbangan politik itu ada bila sistem politik dapat memberikan umpan baik yang sesuai, baik model kegunaan maupun model psikologi juga sama-sama mengandalkan pengertian mengenai dorongan dan tanggapan atau *input* dan *output*, konsep-konsep yang menghubungkan yang berkesinambungan antara rakyat dan penguasa menurut kriteria tertentu.

Model kegunaan umum dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah sistem politik. Model ini mengambil asas-asas teori sistem umum, seperti distorsi informasi, kecenderungan untuk mengurangi ketegangan didalam, kesenjangan dan kepuasan berlebihan,. Model ini memakai pengertian bahwa semakin banyak energi yang diberikan kepada proses informasi dalam sistem, semakin besar kemungkinan sistem itu tetap hidup. David Easton telah membangun sebuah model kegunaan untuk politik.¹⁸

Perilaku politik menurut Sudijono Sastroatmodjo ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat.¹⁹ Faktor pembentuk identitas bersama itu menurut Ramlan Surbakti mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas.²⁰ Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai

¹⁸Lihat David Easton, "An Approach to political system, dalam word politics, Vol. 9 (1957), hal. 383-400

¹⁹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hal.228.

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982, hal. 44-47

keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Menurut (Sobolim, 2013) Perilaku politik atau (Politic Behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik apapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat)
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

B. Konsep Anggota Dewan

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang disebut parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Anggota dewan adalah bagian tubuh majelis atau badan yang terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding.

Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.²¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga negara dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3: “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan perintah daerah. Dalam kedudukannya yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan otonomi dan tugas pembantuan.

C. Perilaku Anggota Dewan

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun

berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.²²

²¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah* Pasal 29 ayat (1).

²²RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999 Hal 130

Pendekatan perilaku tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. “Pendekatan perilaku mempelajari parlemen, maka yang dibahas antara lain perilaku anggota parlemen seperti pola pemberian suara (*voting behavior*) terhadap rancangan undang-undang tertentu (apakah pro atau anti, dan mengapa demikian), pidato-pidatonya, giat-tidaknya memprakarsai rancangan undang-undang, cara berinteraksi dengan teman sejawat, kegiatan *lobbying*, dan latar belakang sosialnya”.²³

Pendekatan perilaku, meneliti tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan dan sebagainya. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat indiscipliner, tidak saja mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosiologis, dan psikologis.

Di samping itu, pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok, yang oleh David Easton (1962) dan Albert Somit (1967), diuraikan sebagai berikut.

- a. Perilaku politik menampilkan keteraturan (*regularities*) yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian dibuktikan atau diverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur atau dikualifikasikan antara lain melalui statistik dan matematika;
- b. Harus ada usaha membedakan secara jenis antara norma (ideal atau standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman);

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 92-93.

- c. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti; setiap analisis harus bebas-nilai (*value-free*), sebab benar/tidaknya nilai-nilai seperti misalnya demokrasi, persamaan, kebebasan, tidak dapat diukur secara ilmiah;
- d. Penelitian harus sistematis dan menuju pembentukan teori (*theory building*);
- e. Ilmu politik harus bersifat murni (*pure science*); kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) dan menyusun rencana perbaikan perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik harus terbuka bagi dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya.²⁴

Pendekatan perilaku, tidak hanya mempelajari institusi-institusi, tetapi juga manusia di dalamnya, seperti perilaku anggota dewan bagaimana mereka menjalankan tugas, dan memandang perilaku mereka sendiri. Ciri khas dari pendekatan perilaku ialah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagiannya saling berinteraksi, saling bergantung, dan semua bagian bekerja sama untuk menunjang terselenggaranya sistem itu. Sistem mengalami stress dari lingkungan, tetapi berusaha mengatasinya dengan memelihara keseimbangan. Dengan demikian sistem dapat bertahan. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku anggota dewan sebagai kader parpol dan wakil masyarakat.

²⁴David Easton, "The Current Meaning of Behavioralism In Political Science" Dalam James C. Charlesworth, eds, *The Limits Of Behavioralism in Political Science* (Philadelphie, 1962), h. 7-8; Albert Somit dan Jacob Tanenhaus, *The Development of American Political Science*, h. 177-179.

D. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan (b) pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya di muka bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal jalannya pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah, pada pasal 149 ayat 1 dipaparkan bahwa terdapat tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah;
2. fungsi *budgeting*, yaitu fungsi penetapan anggaran;
3. fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan perundang-undangan.²⁵

Sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi lembaga legeslatif di daerah ini menjadi tiga, yaitu (1) fungsi pengawasan, (2) fungsi legislati, dan (3) fungsi representasi. Apa yang diatur dalam Pasal 292 ayat (92) dan pasal 343 ayat (2) UU 27/2009 mengisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, melainkan juga fungsi representasi.²⁶

Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD dalam kerangka mengemban amanat rakyat di provinsi dan kabupaten/kota. dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan

²⁵*Ibid*, Pasal 149 (ayat 1).

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 35.

daerah dan penduduknya ke hadapan Pemerintah Pusat dan DPR dengan sepengetahuan kepala Daerah yang bersangkutan.²⁷

Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan pendapat dan mengadakan penyelidikan.²⁸ Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.²⁹

E. Indikator-Indikator Perilaku Anggota Dewan

1. Kaderisasi

Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.

²⁷ *Ibid*, h. 35.

²⁸ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 78.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 195.

Dalam definisinya menurut kamus ilmiah populer, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet dari suatu partai atau organisasi.

Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin.

Kaderisasi politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena Kaderisasi politik merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.

Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.

Namun dalam kenyataannya, implementasi antara kaderisasi dan rekrutmen masih rancu dalam perpolitikan nasional, dimana masih banyak partai yang sulit membedakan antara keduanya. Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat.

Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihanannya, yaitu :

- a. Berkepribadian positif
- b. Gigih
- c. Mempunyai loyalitas

- d. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi
- e. Memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME sebagai penentu yang mutlak.

Kaderisasi formal, kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut.

Istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai sertifikat formal yang dimiliki. Istilah kader lebih mengacu pada dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki seseorang. Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematis, terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan berjenjang. Komponen utama kaderisasi adalah:

- a. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan.
- b. Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan.
- c. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.³⁰

Selain ketiga komponen di atas, seorang kader juga harus memiliki cita-cita dan idealisme untuk berjuang atau nasionalistik. Idealisme ini merupakan motivasi atau kekuatan

³⁰ H. Mangkubumi. 1989. Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya

pendorong seseorang untuk bersedia berjuang atau melibatkan diri dalam perjuangan. Dewasa ini, kecenderungan materialistis yang terlihat ditengah masyarakat membuat motif perjuangan dirasa terlalu naif dan tidak realistis. Sudah semestinya seorang kader dituntut untuk memiliki kemampuan berjuang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing karena hanya dengan kapasitas seperti itulah tujuan perjuangan dapat dicapai.

Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses kaderisasi di dalamnya apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lainnya.

Dalam kaderisasi pasti memberikan pengarahan dan pelatihan. Masalahnya adalah terkadang atau sering hal – hal yang disampaikan tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan di kehidupan sebenarnya. Contoh dalam kaderisasi pemberi pelatihan mengatakan bahwa kita harus disiplin, tapi ternyata ketika dia rapat untuk mempersiapkan kaderisasi, dia sering terlambat. Hal inilah yang membuat banyak kaderisasi saat ini tidak berjalan. Rasulullah, dalam mengkader, tidaklah sembarangan. Beliau melakukan apa yang ia katakan. Sehingga kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan.

Kemampuan profesional semakin lama semakin terasa dibutuhkan, mengingat konsekuensi dinamika dan perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan diferensiasi dan spesialisasi. Kedua hal tersebut merupakan

salah satu ciri perkembangan ke arah modernisasi yang perlu disadari sepenuhnya dan diberi respon dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Seorang kader juga diharapkan memiliki stamina atau daya tahan perjuangan karena pada dasarnya tidak ada proses dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kaderisasi merupakan proses perjuangan seorang kader dimana dengan motivasi dan idealismenya yang tinggi diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Kaderisasi bukan merupakan proses yang cepat, akan tetapi berjenjang, sistematis, terus menerus dan cenderung memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kaderisasi pada setiap partai politik memiliki cara tersendiri untuk melatih kader mereka yang biasanya terkait dengan penanaman ideologi dan garis perjuangan partai

Kaderisasi merupakan suatu proses pengkaderan yang dilaksanakan secara terus menerus, sistematis dan konsisten mencakup tidak saja aspek kognitif tetapi juga motivatif.

a. Pendidikan Kaderisasi

Kaderisasi sebagai pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. Kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, sasaran kaderisasi (obyek).

Untuk yang pertama subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi.

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam,

ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya.

Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

Jadi dalam pendidikan kaderisasi memiliki tugas atau tujuan sebagai proses humanisasi atau pemanusiaan dengan cara transformasi nilai-nilai agar tri dharma perguruan tinggi dapat terwujud. Pemanusiaan manusia disini dimaksudkan sebagai sebuah proses mentransfer nilai-nilai yang membuat manusia agar mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya (spiritual, intelektual dan moral). Jadi dengan sendirinya, dalam kaderisasi harus terdapat sebuah persiapan agar mampu beradaptasi dan berintegrasi melalui konsientisasi dalam proses dimana manusia mendapatkan kesadaran yang terus semakin mendalam tentang realitas kultural yang melingkupi hidupnya dan akan kemampuannya untuk merubah realitas itu dalam ranah pembebasan dari dehumanisasi, dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kaderisasi bukanlah agenda yang selesai dalam waktu yang singkat. Proses pendidikan hanya akan dapat berhasil ketika telah dijalankan secara simultan dan menyentuh aspek yang menyeluruh. Tidak sekedar mengajar tapi mendidik. Tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, namun memaksimalkan aspek afektif dan psikomotorik. Dalam kegiatan ini, yang perlu dilakukan adalah peningkatan pengetahuan (aspek

kognitif) dan peningkatan kesadaran dan dorongan berjuang (bersifat motivatif). Peningkatan pengetahuan dibutuhkan sebagai bekal untuk dapat melakukan pengamatan, agar analisis yang dilakukan berwawasan luas dan rasional terhadap berbagai persoalan yang ada di sekelilingnya. Tetapi meningkatnya pengetahuan tidaklah cukup tanpa diimbangi oleh adanya kesadaran dan dorongan untuk menggunakan pengetahuan yang didapat dalam rangka perjuangan menggapai tujuan (cita-cita). Dalam pendidikan kader perlu diberikan pengetahuan yang bersifat motivatif yang berdasarkan pada pengetahuan yang luas, sehat dan mendalam.

Proses pengkaderan atau kaderisasi yang dilakukan oleh parpol terhadap anggota partai calon kader merupakan kelanjutan dari fungsi parpol, yaitu fungsi edukasi (pendidikan) dan fungsi rekrutmen. Parpol sejatinya dalam menjalankan fungsi pendidikan politik tidak boleh pilih kasihnya kepada anggota saja tetapi juga kepada semua warga negara. Namun demikian fungsi pendidikan politik tetap dijalankan oleh internal parpol sebagai kelanjutan dari fungsi rekrutmen, dimana parpol setelah merekrut individu-individu dari masyarakat menjadi anggota akan memberikan pendidikan politik.

Setiap anggota partai politik belum tentu otomatis menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh parpol dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan pendidikan politik kader.

Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai dan kehidupan organisasi. Pendidikan politik lebih

berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai. Pendidikan ini lebih bersifat memelihara mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenjang, yaitu:

1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk:

- a. pemahaman arti berorganisasi,
- b. menanamkan loyalitas terhadap organisasi,
- c. memantapkan dedikasi. Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula.

2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:

- a. membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai,
- b. menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi,
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya.

3. Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk:

- a. membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual,
- b. membidik cara berpikir sistematis dan strategis,
- c. membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa politik,
- d. mendidik berpikir futuristic. Jenjang ini diperuntukkan bagi caloncalon politisi.

B. Pengembangan Kaderisasi

Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan suatu bentuk kemampuan nyata sekaligus

kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan tersebut dalam penghayatan dan pengumpulannya di tengah masyarakat. Dengan demikian kemandirian akan tumbuh dan berkembang dalam dirinya, perjuangan mereka akan menjadi bagian dari jiwa dan kehidupannya. Pematangan dan pendewasaan kader inilah yang dirasakan sekarang ini sebagai bagian yang cukup sulit dalam melakukan kaderisasi.

Dalam kegiatan kaderisasi, diharapkan tujuan akhir yang hendak dicapai yakni untuk menciptakan seorang kader yang tidak berpandangan atau berwawasan sempit, sektoral, dan hanya patuh secara buta terhadap satu kepentingan golongan tertentu tanpa melihat kepentingan nasional. Prinsip jiwa nasionalisme atau patriotisme ini menghendaki setiap kader secara sukarela dan ikhlas menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Kata kunci yang menjadi fokus kaderisasi adalah masa depan, pendidikan, simultan, dan sinergisitas. Secara garis besar, empat kata itulah yang dapat mewakili kaderisasi. Adanya proses pendidikan simultan untuk mendidik kader-kader secara kolektif yang akan membentuk sinergisitas dalam gerak organisasi di masa depan. Karena kader harus berkualifikasi, maka dibutuhkan pendidikan. Karena pendidikan harus mencakup aspek yang komprehensif, maka dibutuhkan usaha jangka panjang dan berkelanjutan. Mengingat organisasi membutuhkan kerjasama, maka pembentukan kader harus melahirkan kesadaran dan kepemimpinan kolektif antar personal. Dan hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya sinergitas antar pemimpin. Tidak hanya sinergisitas kerja, namun juga sinergis dalam bentuk keselarasan hati, sikap saling mengerti, dan mampu membentuk bangunan organisasi yang kuat.

Dari pemikiran di atas inilah ruh kaderisasi akan dimulai. Potensi dan tantangan sebuah proses kaderisasi memang selalu terasa lebih berat, namun janji balasan Tuhan berupa para penerus masa depan akan mampu menjadi obat lelahnya perjuangan ini. Terlalu banyak kegelisahan individual yang tersebar di masyarakat ini. Sekaranglah saatnya menyatukan kegelisahan kegelisahan tersebut menjadi sebuah kepedulian kolektif yang akan meninggalkan jejak nyata perubahan masa depan.

Kaderisasi haruslah holistik. Banyak aspek yang harus dikembangkan dan tersentuh oleh kaderisasi untuk menghasilkan kader yang ideal. Aspek tersebut adalah

1. Fisikal (kesehatan)
2. Spiritual (keyakinan, agama, nilai)
3. Mental (moral dan etika, softskill, kepedulian)
4. Intelektual (wawasan, keilmuan, keprofesian)
5. Manajerial (keorganisasian, kepemimpinan)

Dari setiap aspek yang dikembangkan, harus ada sinergi dan keseimbangan agar tiap aspek bisa menunjang aspek yang lainnya sehingga potensi si kader teroptimalisasi.

c. Bentuk Kaderisasi Partai Politik

1. Kaderisasi pasif

Kaderisasi pasif dilakukan secara insidental dan merupakan masa untuk kenaikan jenjang anggota. Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan *‘learning to know’* dan sedikit *‘learning to be’*. Pembinaan pasif sangat penting dan efektif dalam pembinaan dan penjagaan.

2. Kaderisasi aktif

Kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak, karena pada kaderisasi ini, anggotalah yang mencari sendiri materinya. Pada momen ini, anggota mendapatkan

pembinaan ‘learning to know’, ‘learning to do’, dan ‘learning to be’ sekaligus. Maka dalam hal ini sangat penting untuk dipahami, bahwa setiap rutinitas kegiatan, haruslah memberdayakan potensi anggota sekaligus menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. Kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan secara sistematis.

d. Instrumen Terlibat Dalam Kaderisasi Partai Politik

Anggota Partai adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.

Kader Partai adalah anggota Partai yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai. Pembentukan Kader Partai dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader.

1. Strata Kader Partai :

- a. Kader Penggerak.
- b. Kader Pratama.
- c. Kader Muda.
- d. Kader Madya.
- e. Kader Utama.
- f. Kader Manggala.

2. Kader Partai dipersiapkan untuk menjadi:

- a. Calon Pengurus Partai
- b. Bakal calon Anggota DPR dan DPRD.
- c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

3. Untuk mendapatkan kader-kader yang sesuai dengan anggota partai adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah menikah
- c. Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan partai lainnya
- d. Bersedia menyatakan diri menjadi anggota partai politik
- e. Setiap Anggota berkewajiban mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai lainnya, mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai, membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai, menghadiri rapat-rapat dan kegiatan Partai, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai, dan membayar iuran anggota (Hak Anggota).
- f. Setiap Anggota berhak memperoleh perlakuan yang sama, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, memilih dan dipilih, memperoleh perlindungan dan pembelaan, memperoleh pendidikan dan pelatihan kader, memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri (Tata Tertib Berakhirnya Keanggotaan).
- g. Keanggotaan berakhir ketika anggota: Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, diberhentikan, meninggal dunia, atau Pindah ke partai lain.

Anggota dapat diberhentikan karena: Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota, melanggar Anggaran

Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Kongres, atau Rapat Pimpinan Nasional, atau Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.

Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kaderisasi merupakan proses perjuangan seorang kader dimana ia dengan motivasi dan idealismenya yang tinggi diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Kaderisasi bukan merupakan proses yang cepat, akan tetapi berjenjang, sistematis, terus menerus dan cenderung memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kaderisasi pada setiap partai politik memiliki cara tersendiri untuk melatih kader mereka yang biasanya terkait dengan penanaman ideologi dan garis perjuangan partai.

2. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan ini baru ada di negara modern.³¹

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Menurut Miriam Budiardjo menyatakan “Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya

³¹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, h.397.

mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”.³²

Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiel”.³³

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan “Partai politik adalah organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui perwakilan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda”.³⁴

Giovanni Sartori (dalam prof. Miriam Budiardjo, 2008 hlm. 404-405) partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan caloncalonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public³⁵

Undang-undang Nomor 2 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 27 Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³²*Ibid*, h.404.

³³J. Carl Friedrich, *An Introduction to Political Theory*; Twelve Lectures of Howard, (New York: Herper And Row, 1967), h. 419.

³⁴Sigmund Neumann, “*Modern Political Parties*,” dalam *Cooperative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dari David E. Apter, (London: The Free Press of Glencoe, 1963), h. 352.

³⁵Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*,h.404-405

Partai politik dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat Nasional yang terbuka untuk semua kalangan orang untuk ikut andil dalam menjadi anggota partai dengan berpegang teguh pada pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dijelaskan bahwa partai politik merupakan wadah atau organisasi dari aktivis-aktivis politik yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan cara konstitusional dalam melaksanakan programnya.

a. Dasar Hukum Partai Politik

Menurut Undang-undang Keparitaan No. 2 Tahun 2011
Pasal 2:

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
 - (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
 - (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- 2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- 4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: asas dan ciri Partai Politik; (2) visi dan misi

Partai Politik; (3) nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; (4) tujuan dan fungsi Partai Politik; (5) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; (6) kepengurusan Partai Politik; (7) mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik; (8) sistem kaderisasi; (9) mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; (10) peraturan dan keputusan Partai Politik; (11) pendidikan politik; (12) keuangan Partai Politik; dan (13) mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

- 5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-04.Ah.11.01 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum Dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang 29 Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

b. Tujuan Partai Politik

Dibentuknya partai politik di berbagai Negara mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan cita-cita dari partai politik tersebut yang diinginkan, tujuan partai politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 2 pasal 10 Tahun 2008 tentang partai politik, tujuan umum partai politik meliputi :

- 1) mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan umum partai politik, tidak terlepas dari tujuan khusus partai politik meliputi:

- a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka.
- b) penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- c) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Kedudukan Partai Politik

Kedudukan partai politik adalah sebagai organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

d. Fungsi Partai Politik

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 11 Tahun 2008 Tentang Fungsi Partai Politik, penjelasan tentang fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Wakil Masyarakat

Pengertian konstituen di Indonesia sampai hari ini terdapat beberapa pendapat antara lain: Pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandat pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh partai atau anggota parlemen (Konsolidasi Demokrasi, 2005).

Dalam hal ini tidak akan mempersoalkan definisi konstituen mana yang paling sah, akan tetapi lebih memilih satu pengertian dari beberapa pengertian seperti tersebut di atas agar penulis mengetahui yang dimaksud dalam terkait dengan konstituen. Dalam hal ini yang dimaksud Konstituen adalah Pemilih di Daerah Pemilihan. Konstituen di era reformasi memegang peran penting dalam ikut mewarnai perkembangan partai politik. Semakin besar konstituen yang mendukung dalam pemilihan umum legislatif, semakin besar pula partai tersebut mempunyai akses dan aset dalam kekuasaan, semakin kuat pengaruhnya di publik serta semakin stabil kepengurusan partainya. Sebaliknya, apabila partai mendapatkan mandat yang kecil dari konstituen, semakin kecil juga pengaruh terhadap pemanfaatan akses dan aset publik, semakin kecil pengaruhnya dalam

mempengaruhi kebijakan publik dan rentan terhadap konflik internal partai. Sifat dukungan konstituen di Indonesia sampai saat ini masih sangat labil, karena meskipun sebagian besar konstituen adalah anggota partai, tetapi karakter keanggotaannya menggantung ke atas. Artinya di dalam internal partai anggota tidak memegang peran penting dalam penentuan kebijakan partai atau arah kebijakan partai lebih banyak ditentukan dari atas.

Dukungan konstituen terhadap partai politik setiap saat dapat berubah tergantung kepentingan sesaat konstituen, isu aktual yang berkembang di publik dan pemahaman konstituen terhadap situasi aktual partai. Dukungan konstituen yang labil seperti tersebut di atas berpengaruh terhadap perkembangan partai politik, dimana arah perkembangannya lebih banyak dipengaruhi dari faktor eksternal, seperti: media massa yang menguasai opini publik dan money politik yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pragmatisme pemilih. Sedangkan ideologi, program, kompetensi dan manajemen partai belum banyak berpengaruh terhadap arah kebijakan dan perkembangan partai politik.

Masing-masing karakter konstituen mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri, antara lain :

1. Kekuatan pada karakter konstituen konservatif adalah mempunyai loyalitas tinggi, tidak mudah tergoyahkan atas pilihan yang telah ditetapkan, rela berkorban (materi, waktu maupun fasilitas lain) untuk mendukung pilihannya dan dari awal pilihannya mudah dikenali oleh partai politik. Sedangkan kelemahannya adalah cenderung bekerja dengan irama dan logikanya sendiri, meremehkan pendukung lain terutama pendukung yang rasional apalagi yang pragmatis, mudah tersinggung apabila keinginannya tidak terakomodir.
2. Pada Konstituen Rasional kekuatannya adalah dapat menjelaskan pada orang lain dengan argumen yang meyakinkan, perilakunya terkendali dan dapat diprediksi,

mudah dikoordinasikan, begitu sudah yakin dengan pilihannya ia akan menjadi corong partai yang baik. Kelemahannya, selalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang kemudian sering menjadi pangkal kesalah pahaman, menjaga jarak dengan partai.

3. Sementara pada konstituen pragmatis kekuatannya adalah kemauannya mudah dikenali, tidak mudah tersinggung, sepak terjangnya mudah diukur. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat diandalkan, menentukan pilihannya di saat-saat terakhir, bekerja berdasarkan perspektinya sendiri. Karakter konstituen seperti tersebut di atas juga mengalami perubahan secara dinamis sesuai dengan tuntutan kebutuhan konstituen, kondisi aktual partai politik, opini publik dankodisi sosial, ekonomi dan politik lokal, regional dan nasional.

F. Definisi Operasional

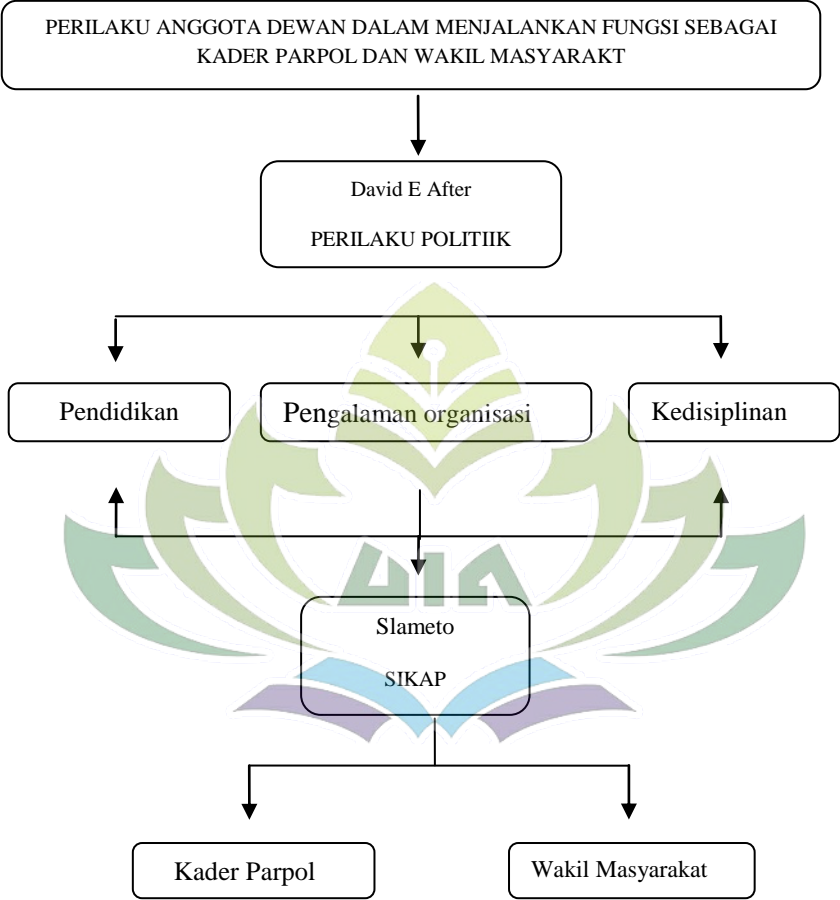
Untuk memudahkan pengamatan dan pengukuran variabel pada penelitian ini, maka variabel yang ada perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut.

1. Perilaku adalah gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan perilaku tidak saja terbatas pada perilaku perorangan saja, akan tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar, dalam hal berkaitan dengan perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai kader parpol dan wakil rakyat.
2. Anggota dewan adalah bagian tubuh majelis atau badan yang terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Kader parpol adalah individu atau orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi partai politik tertentu. Anggota Dewan sebagai kader parpol berfungsi:
 - a. Mediator komunikasi politik
 - b. Mediator sosialisasi politik
 - c. Mediator rekrutment politik
 - d. Pengatur konflik.
4. Fungsi Anggota dewan sebagai wakil masyarakat merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menjalankan fungsi:
 - a. legislasi
 - b. anggaran
 - c. pengawasan



Kerangka Pikir
Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi
Sebagai Kader Parpol Dan Wakil Masyarakat



Tabel Kerangka Pikir

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). h. 859
- Lonto dan Pangalila, *Etika Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.137
- Gatara, Sahid, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Kajian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007), h.228-229
- Muhammad Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2016), h.154
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2011.), h..2
- RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999 Hal 130
- David E After, *pengantar analisa politik*, (Jakarta : LP3ES 1985), h. 209-210
- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hal,228
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 92-93
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 35

Sumber Jurnal

- Hendrarto. Jurnal” *Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mencetak Kader Pemimpin (Mekanisme dan Tanggung Jawab Pemimpin)*. Vol. 26 No. 2, 15 September 2006 (Tahun ke-13): 310-318.
- Mohammad Hidayatturrahman, Jurnal “*Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep*. Jurnal Sosial Politik, Vol 6 No 1 (2020), Hlm 128-141

Markus Gunawan, SH, Mkn, Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD) (Jakarta, Visimedia, 2008), 170

Sumber Skripsi

Zulkarnain Ridlwan, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, pengembangan dari Tesis pada Magister Hukum UGM a.n. Zulkarnain Ridlwan, *Perkembangan Pengaturan Atas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2010.

Claudia Asfica, JOM. “Peran dan Perilaku Anggota Dewan Kota Pekanbaru Fungsi Legislasi Tahun 2015. FISIP. Vol.4 No. 2, Oktober 2017.

Sumber Peraturan

Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah* Pasal 29 ayat (1)

Pasal 45 huruf (e) UU 32/2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Pasal 301 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat*

UU Nomor 27 Tahun 2009, *Op.Cit*, Pasal 351 dan Pasal 366.

Sumber Online

Riaty Raffiudin, *Modul 1 Ruang Lingkup Teori politik*. Tersedia (online) di <https://repository.ut.ac.id/4210/1/IPEM4215-MI.pdf>. Diakses pada minggu 21 maret 2020 pukul 03.44 WIB